



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANTUL
NOMOR 129 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.283.955.356.166,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp551.994.008.396,00 (lima ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp237.088.495.863,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.682.140.820,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.707.166.955,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp216.516.204.758,00 (dua ratus enam belas miliar lima ratus enam belas juta dua ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 5

Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel Rp5.970.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah); dan
 - b. Pajak Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar), terdiri atas :
 - a. Pajak Restoran dan sejenisnya Rp6.543.000.000,00 (enam miliar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- b. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya Rp4.785.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - c. Pajak Warung dan sejenisnya Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah); dan
 - d. Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), terdiri atas :
- a. Pajak Pameran Rp371.784.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - b. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - c. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); dan
 - d. Pajak Pertandingan Olahraga Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah), terdiri atas :
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. Pajak Reklame Kain Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah); dan
 - d. Pajak Reklame Berjalan Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp52.700.000.000,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp1.070.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp57.125.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k direncanakan sebesar Rp97.173.995.863,00 (sembilan puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.682.140.820,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah), terdiri dari atas :
- Retribusi Jasa Umum;
 - Retribusi Jasa Usaha; dan
 - Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.190.872.820,00 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah), terdiri atas :
- Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp2.105.534.820,00 (dua miliar seratus lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp278.960.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Retribusi Pelayanan Pasar Rp4.994.064.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam puluh empat ribu rupiah);

- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp1.278.511.500,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp21.602.500,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah);
 - g. Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rp112.200.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);
 - i. Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); dan
 - j. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.723.268.000,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp1.673.795.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan Rp86.700.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Retribusi Terminal Rp187.173.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp52.634.350.000,00 (lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp1.786.250.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.768.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), terdiri atas :
- a. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah); dan
 - b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp28.707.166.955,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah lembaga keuangan sebesar Rp28.200.166.955,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
 - b. bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah aneka usaha sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah); dan
 - c. bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah bidang air minum sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp216.516.204.758,00 (dua ratus enam belas miliar lima ratus enam belas juta dua ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri dari atas :
- a. hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan;
 - c. jasa giro;

- d. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e. pendapatan bunga;
 - f. penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - g. pendapatan denda Retribusi Daerah; dan
 - h. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.012.036.421,00 (satu miliar dua belas juta tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas :
- a. hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp907.036.421,00 (sembilan ratus tujuh juta tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah); dan
 - b. hasil penjualan gedung dan bangunan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil sewa BMD, direncanakan sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), terdiri atas :
- a. hasil sewa BMD sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); dan
 - b. hasil kerja sama pemanfaatan BMD sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jasa giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah, direncanakan sebesar Rp16.750.000.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, direncanakan sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pendapatan denda retribusi jasa umum, direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp198.140.168.337,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar seratus empat puluh juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.725.961.347.770,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas :
- pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.492.976.763.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas :
- dana perimbangan;
 - dana insentif daerah; dan
 - dana desa.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.322.674.717.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), terdiri atas :
- Dana transfer umum Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp30.534.012.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh empat juta dua belas ribu rupiah);
 - Dana transfer umum Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp943.058.991.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga miliar lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Dana transfer khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp59.502.244.000,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - Dana transfer khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar Rp289.579.470.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- (4) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp46.092.293.000,00 (empat puluh enam miliar sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp124.209.753.000,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp232.984.584.770,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas :
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (7) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak, direncanakan sebesar Rp180.347.176.620,00 (seratus delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (8) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, direncanakan sebesar Rp52.637.408.150,00 (lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu seratus lima puluh rupiah).

Pasal 11

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.406.376.986.992,00 (dua triliun empat ratus enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.812.704.870.800,00 (satu triliun delapan ratus dua belas miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus), terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp931.368.288.392,00 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp806.290.714.659,00 (delapan ratus enam miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.018.565.449,00 (tujuh puluh miliar delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.027.302.300,00 (lima miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 14

- Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp931.368.288.392,00 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;

- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. belanja penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- g. Belanja Pegawai BOS; dan
- h. belanja pegawai BLUD.

Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp575.926.217.002,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu dua rupiah), terdiri atas :
- a. Gaji Pokok ASN Rp411.304.829.809,00 (empat ratus sebelas miliar tiga ratus empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp41.152.575.955,00 (empat puluh satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp7.586.283.462,00 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp40.614.352.554,00 (empat puluh miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp5.231.513.250,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp24.240.281.780,00 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp3.626.760.845,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp14.330.065,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu enam puluh lima rupiah);

- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp34.426.526.827,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp1.056.925.238,00 (satu miliar lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp3.154.296.444,00 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah); dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp3.517.540.773,00 (tiga miliar lima ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp120.120.147.388,00 (seratus dua puluh miliar seratus dua puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp36.680.714.998,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp83.439.432.390,00 (delapan puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp164.866.574.970,00 (seratus enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp11.845.614.970,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp143.052.318.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar lima puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

- c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp3.515.250.000,00 (tiga miliar lima ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - e. Belanja Honorarium Rp6.452.017.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh belas ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp23.960.443.592,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp140.561.400,00 seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp110.074.400,00 (seratus sepuluh juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp138.852.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp63.194.900,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp6.261.373.392,00 (enam miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

- l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp4.723.200.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah); dan
- m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp14.805.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp185.837.260,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp15.288.000,00 (lima belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp7.097.160,00 (tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp3.319.260,00 (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp1.960,00 (seribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp6.726.720,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah); dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f direncanakan sebesar Rp1.093.120.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf g direncanakan sebesar Rp28.385.510.500,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf h direncanakan sebesar Rp16.830.437.680,00 (enam belas miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp806.290.714.659,00 (delapan ratus enam miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.078.512.891,00 (seratus lima puluh miliar tujuh puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu, terdiri atas:
- a. belanja barang pakai habis Rp148.899.037.891,00 (seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
 - b. belanja barang tak habis pakai Rp1.179.475.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp302.651.960.268,00 (tiga ratus dua miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor Rp229.721.407.600,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp36.453.433.910,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp3.250.946.558,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp10.034.088.000,00 (sepuluh miliar tiga puluh empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp2.752.331.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp0,00 (nol rupiah);
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp975.625.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp5.221.829.280,00 (lima miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp8.256.411.020,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus sebelas ribu dua puluh rupiah);
 - j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Rp93.750.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp124.480.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp4.877.457.900,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
 - m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah); dan

- n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp835.200.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.307.808.240,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh juta delapan ratus delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp129.200.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp8.546.482.500,00 (delapan miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp12.181.924.029,00 (dua belas miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah);
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp5.264.166.711,00 (lima miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp186.035.000,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.320.357.000,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp43.820.357.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp37.650.200.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp11.212.050.000,00 (sebelas miliar dua ratus dua belas juta lima puluh ribu rupiah); dan

- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp26.438.150.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp72.535.775.140,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp172.746.101.120,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus satu ribu seratus dua puluh rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.018.565.449,00 (tujuh puluh miliar delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada BUMD;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp202.950.000,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.994.650.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.858.652.049,00 (enam puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Rp20.624.095.700,00 (dua puluh miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp6.811.112.500,00 (enam miliar delapan ratus sebelas juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah); dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp36.318.443.849,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - d. Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.962.313.400,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, direncanakan sebesar Rp5.027.302.300,00 (lima miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.477.302.300,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 21

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp230.168.315.856,00 (dua ratus tiga puluh miliar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah).
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp64.200.495.964,00 (enam puluh empat miliar dua ratus juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;

- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.150.000,00 (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp486.950.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.517.220.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp2.451.220.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Belanja Modal Alat Ukur direncanakan sebesar Rp175.030.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.247.579.796,00 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kantor Rp2.166.996.320,00 (dua miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp2.904.920.476,00 (dua miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp175.663.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.022.750.000,00 (satu miliar dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Studio Rp212.050.000,00 (dua ratus dua belas juta lima puluh ribu rupiah);
 - Belanja Modal Alat Komunikasi Rp509.400.000,00 (lima ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp301.300.000,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 16.178.964.000,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Kedokteran Rp15.972.964.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.474.010.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp72.060.000,00 (tujuh puluh dua juta enam puluh ribu rupiah); dan
 - Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Rp151.950.000,00 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.971.970.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), terdiri atas:
- Belanja Modal Komputer Unit Rp6.081.040.000,00 (enam miliar delapan puluh satu juta empat puluh ribu rupiah); dan
 - Belanja Modal Peralatan Komputer Rp2.890.930.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh tiga puluh ribu rupiah).

- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Deteksi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Belanja Modal Alat Pelindung Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya direncanakan sebesar Rp236.500.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat, direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp18.400.460.968,00 (delapan belas miliar empat ratus juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.103.461.200,00 (delapan miliar seratus tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp36.458.208.688,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas :
- Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja, direncanakan sebesar Rp36.098.208.688,00 (tiga puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan sebesar Rp114.114.807.812,00 (seratus empat belas miliar seratus empat belas juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.820.187.273,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus dua puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan Rp63.393.107.743,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp12.427.079.530,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.944.103.539,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp7.181.212.858,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Rp4.825.384.600,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp1.840.606.081,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta enam ratus enam ribu delapan puluh satu rupiah);

- d. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah); dan
 - e. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp718.900.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.213.100.000,00 (sembilan miliar dua ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp1.541.750.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp7.655.250.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Modal Jaringan Listrik direncanakan sebesar Rp14.137.417.000,00 (empat belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e direncanakan sebesar Rp7.294.803.392,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Tanaman;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- (3) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp890.900.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.213.403.392,00 (enam miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp24.076.266.839,00 (dua puluh empat miliar tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp339.427.533.497,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.677.040.097,00 (tiga puluh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, direncanakan sebesar Rp26.764.871.787,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, direncanakan sebesar Rp3.912.168.310,00 (tiga miliar sembilan ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp308.750.493.400,00 (tiga ratus delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
- (6) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp100.152.000,00 (seratus juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp308.650.341.400,00 (tiga ratus delapan miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp97.236.088.400,00 (sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp211.414.253.000,00 (dua ratus sebelas miliar empat ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 29

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp122.421.630.826,00 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp158.921.630.826,00 (seratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.921.630.826,00 (seratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas :

- a. Pelampauan Penerimaan PAD adalah Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah, direncanakan sebesar Rp2.273.110.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- b. Penghematan Belanja direncanakan sebesar Rp145.648.520.826,00 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas :
 1. Penghematan Belanja-Belanja Operasi Rp81.863.236.000,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 2. Penghematan Belanja-Belanja Modal Rp63.785.284.826,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat berupa Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp36.500.000.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. Penyertaan modal daerah; dan
 - b. Pemberian pinjaman daerah
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) direncanakan sebesar Rp25.500.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar).

Pasal 32

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp122.421.630.826,00) (seratus dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp122.421.630.826,00 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas :

- a. LAMPIRAN I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. LAMPIRAN II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. LAMPIRAN III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. LAMPIRAN IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. LAMPIRAN V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. LAMPIRAN VI : Daftar Nama Pencrима, Alamat Pencrима, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. LAMPIRAN VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. LAMPIRAN VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. LAMPIRAN IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objck Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan

- j. LAMPIRAN X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 29 Desember 2022

 BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

 SETDA
HELMU JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 129

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	551.994.008.396
4.1.01	Pajak Daerah	237.088.495.863
4.1.01.06	Pajak Hotel	6.000.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	5.970.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	5.970.000.000
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	30.000.000
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	30.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	19.000.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.543.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	6.543.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.785.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4.785.000.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	172.000.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	172.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	7.500.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	7.500.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	625.000.000
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	371.784.000
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	371.784.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	235.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	235.000.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	18.000.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	18.000.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	216.000
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	216.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.900.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.180.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.180.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	250.000.000
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	250.000.000
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	470.000.000
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	470.000.000
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	0
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	0
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	52.700.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	52.700.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	52.700.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	201.000.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	201.000.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	201.000.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.070.000.000

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.070.000.000
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	292.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	292.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	292.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	57.125.000.000
4.1.01.15.01	PBBP2	57.125.000.000
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	57.125.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	97.173.995.863
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	97.173.995.863
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	97.173.995.863
4.1.02	Retribusi Daerah	69.682.140.820
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	10.190.872.820
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	400.000.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	400.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.105.534.820
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.105.534.820
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	278.960.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	278.960.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	4.994.064.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	243.254.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	3.275.520.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.475.290.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.278.511.500
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.278.511.500
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	21.602.500
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	21.602.500
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	112.200.000
4.1.02.01.10.0001	Retribusi Rumah Tangga	112.200.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	92.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	92.000.000
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	8.000.000
4.1.02.01.12.0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	8.000.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	900.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	900.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	56.723.268.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.673.795.000
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	1.491.990.000
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	161.555.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	20.250.000
4.1.02.02.02	Retribusi Tempat Belanjaan	86.700.000

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	86.700.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	187.173.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	187.173.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	250.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	250.000.000
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	100.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	100.000.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	52.634.350.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	52.634.350.000
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.786.250.000
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	1.300.000.000
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	125.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	281.250.000
4.1.02.02.11.0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	80.000.000
4.1.02.03-	Retribusi Perizinan Tertentu	2.768.000.000
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	563.000.000
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	563.000.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.205.000.000
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.205.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	28.707.166.955
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	28.707.166.955
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	28.200.166.955
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	28.200.166.955
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	157.000.000
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	157.000.000
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	350.000.000
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	350.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	216.516.204.758
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.012.036.421
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	907.036.421
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	667.036.421
4.1.04.01.02.0005	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	240.000.000
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	105.000.000
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	105.000.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	205.000.000

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	40.000.000
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	165.000.000
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	165.000.000
4.1.04.05	Jasa Giro	275.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	275.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	275.000.000
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	110.000.000
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	110.000.000
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	110.000.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	16.750.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	16.750.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	16.750.000.000
4.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	16.500.000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	16.500.000
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	16.500.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	7.500.000
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	7.500.000
4.1.04.13.01.0006	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	7.500.000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	198.140.168.337
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	198.140.168.337
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	198.140.168.337
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.725.961.347.770
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.492.976.763.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.322.674.717.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	30.534.012.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	21.721.731.000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.114.235.000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.424.341.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	919.151.000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	35.000
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	37.135.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.317.384.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	943.058.991.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	943.058.991.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	59.502.244.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.477.455.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.070.676.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	406.903.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	11.090.000.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.356.000.000

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	24.857.500.000
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	708.246.000
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	15.535.464.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	289.579.470.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	76.504.800.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.520.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	143.052.318.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.515.250.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	24.679.440.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.352.720.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	22.546.105.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	599.596.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	7.254.046.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	410.170.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	200.000.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	365.200.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	588.000.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.981.825.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	46.092.293.000
4.2.01.02.01	DID	46.092.293.000
4.2.01.02.01.0001	DID	46.092.293.000
4.2.01.05	Dana Desa	124.209.753.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	124.209.753.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	124.209.753.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	232.984.584.770
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	180.347.176.620
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	180.347.176.620
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	55.226.695.429
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	36.909.388.530
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	49.587.275.264
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	50.884.291
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	38.572.933.106
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	52.637.408.150
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	52.242.084.150
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	52.242.084.150
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	395.324.000
4.2.02.02.04.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	395.324.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.000.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.000.000.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.000.000.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.000.000.000

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
	Jumlah Pendapatan	2.283.955.356.166
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	1.812.704.870.800
5.1.01	Belanja Pegawai	931.368.288.392
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	575.926.217.002
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	411.304.829.809
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	374.806.262.409
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	36.498.567.400
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	41.152.575.955
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	36.407.346.143
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.745.229.812
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.586.283.462
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.586.283.462
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	40.614.352.554
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	36.390.622.554
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.223.730.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.231.513.250
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.172.176.250
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	59.337.000
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	24.240.281.780
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	20.898.026.360
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.342.255.420
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.626.760.845
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.042.447.659
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	584.313.186
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.330.065
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.708.814
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.621.251
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	34.426.526.827
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	32.606.605.738
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.819.921.089
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.056.925.238
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	909.763.492
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	147.161.746
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.154.296.444
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.891.506.759
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	262.789.685
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	3.517.540.773
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	3.279.172.104
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	238.368.669
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	120.120.147.388
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan Berbasis Belanja Kerja ASN	36.680.714.998

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	36.680.714.998
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	83.439.432.390
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	82.262.268.215
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.177.164.175
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	164.866.574.970
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	11.845.614.970
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	300.000.000
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	950.000.000
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	31.250.000
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	145.000.000
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2.635.000.000
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	10.050.000
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	44.690.177
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	75.000
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	14.600.000
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	2.856.250.000
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.858.699.793
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	143.052.318.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	143.052.318.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.515.250.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	3.515.250.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.375.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.375.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.452.017.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.861.922.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	590.095.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	23.960.443.592
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	110.074.400
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	110.074.400
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	138.852.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	138.852.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	63.194.900
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	63.194.900

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	40.000.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	40.000.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.261.373.392
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	163.111.824
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.196.176
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.090.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.723.200.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	4.723.200.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	14.805.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	14.805.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	185.837.260
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	15.288.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	15.288.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.097.160
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.319.260
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.319.260
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.960
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.960
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.726.720
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.726.720
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	393.120
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.093.120.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	700.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	700.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	28.385.510.500
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	28.385.510.500
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	28.385.510.500
5.1.01.99+	Belanja Pegawai BLUD	16.830.437.680
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	16.830.437.680

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	16.830.437.680
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	806.290.714.659
5.1.02.01	Belanja Barang	150.078.512.891
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	148.899.037.891
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.228.815.976
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.100.104.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.953.384.319
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.590.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.231.192.000
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	48.525.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	128.917.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	311.067.500
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.840.887.575
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	182.156.000
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	65.109.450
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	51.572.500
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.861.886.936
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	117.457.137
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.231.575.540
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	276.990.000
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	16.500.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	686.655.769
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	106.060.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.739.018.089
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	893.675.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.180.358.300
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.337.986.500
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	279.270.500
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.243.681.000
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.267.925.000
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	200.900.000
5.1.02.01.01.0042	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	133.750.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	15.000.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	569.838.800
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	2.550.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.433.524.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.515.497.500
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	15.480.000
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	553.180.000

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	6.820.757.500
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	331.500.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.429.553.500
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	249.250.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	4.500.000
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	135.000.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	20.000.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	126.100.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	230.700.000
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	67.500.000
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	770.250.000
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	410.440.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	690.995.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	659.530.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	3.088.280.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	40.600.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.179.475.000
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	1.179.475.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	302.651.960.268
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	229.721.407.600
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.988.785.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.419.798.500
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	59.500.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	149.625.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	72.000.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	33.400.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	93.900.000
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	12.000.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	2.232.800.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	38.199.300.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	5.280.960.840
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	429.844.000
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.014.440.360
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	180.400.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	140.100.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	595.300.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	1.284.000
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	1.239.900.000
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	351.436.000
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	522.224.000
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	11.407.060.000

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	170.400.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	44.214.705.480
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.177.880.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.028.496.620
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.041.601.920
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	74.394.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.522.736.840
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	377.228.840
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	99.192.000
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	571.150.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	727.100.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.307.372.080
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	9.600.000
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.608.825.000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.566.865.140
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	233.400.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	59.075.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	270.775.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.000.201.500
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	40.125.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	174.350.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.697.137.500
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	532.500.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	774.000.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	40.210.700.000
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	291.075.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.887.070.000
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	47.540.000
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	3.500.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.160.956.780
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	57.330.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	20.600.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	36.453.433.910
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	31.285.699.200
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3	1.344.840.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.322.282.480
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	263.495.680
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	237.116.550
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	3.250.946.558
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	197.600.117
5.1.02.02.03.0002	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	597.937.369
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	354.554.250

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.03.0007	Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya	63.874.977
5.1.02.02.03.0014	Belanja Sewa Tanah Pertanian	1.299.214.845
5.1.02.02.03.0020	Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	12.000.000
5.1.02.02.03.0025	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi	57.125.000
5.1.02.02.03.0029	Belanja Sewa Tanah untuk Taman	4.000.000
5.1.02.02.03.0030	Belanja Sewa Tanah untuk Latihan	250.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.034.068.000
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	29.172.000
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	157.450.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.966.550.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	326.200.000
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	800.000
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	30.000.000
5.1.02.02.04.0103	Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	140.000.000
5.1.02.02.04.0110	Belanja Sewa Alat Produksi Perikanan	5.050.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.917.299.000
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	84.000.000
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.258.350.000
5.1.02.02.04.0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	4.600.000
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	73.625.000
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	806.595.000
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	1.000.000
5.1.02.02.04.0135	Belanja Sewa Peralatan Cetak	50.000.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.303.500.000
5.1.02.02.04.0139	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio SSB	2.200.000
5.1.02.02.04.0140	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM	11.900.000
5.1.02.02.04.0145	Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus	370.450.000
5.1.02.02.04.0146	Belanja Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	0
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	44.100.000
5.1.02.02.04.0272	Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil	33.675.000
5.1.02.02.04.0351	Belanja Sewa Wave Generator and Absorber	1.050.172.000
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	185.000.000
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	22.400.000
5.1.02.02.04.0409	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	92.000.000
5.1.02.02.04.0465	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	68.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.752.331.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	59.500.000
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	35.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.582.831.000
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	75.000.000
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0
5.1.02.02.06.0118	Belanja Sewa Instalasi Lain	0
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Asat Tetap Lainnya	975.625.000

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	584.750.000
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	390.175.000
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	700.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.221.829.280
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	95.000.000
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	0
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	1.335.229.280
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.278.800.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	577.600.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	1.125.000.000
5.1.02.02.08.0037	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya	810.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.256.411.020
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	25.000.000
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	698.000.000
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kewangan	145.000.000
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	71.711.020
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	200.000.000
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	5.511.300.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	265.650.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.339.750.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	93.750.000
5.1.02.02.10.0001	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi	78.750.000
5.1.02.02.10.0009	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan	15.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	124.480.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	2.750.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	121.730.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.877.457.900
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.991.458.900
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	237.505.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	199.450.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	449.044.000
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	55.000.000
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	55.000.000
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	835.200.000
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahany/Kebersihan	792.000.000
	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-	43.200.000

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	26.307.808.240
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	129.200.000
5.1.02.03.01.0032	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB	129.200.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.546.482.500
5.1.02.03.02.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	25.000.000
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	96.700.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	808.695.000
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.237.360.000
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	200.000.000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	405.252.500
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	21.755.000
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	208.000.000
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	490.000
5.1.02.03.02.0111	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	40.000.000
5.1.02.03.02.0112	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	1.500.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.170.840.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	219.600.000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	165.370.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	13.000.000
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	100.000.000
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	250.000.000
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	20.400.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	164.340.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	121.180.000
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	160.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	5.000.000
5.1.02.03.02.0445	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	100.000.000
5.1.02.03.02.0463	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	12.000.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.181.924.029
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	9.531.087.948
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	142.000.000

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakari/Perikanan	1.955.999.976
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	80.000.000
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	371.136.105
5.1.02.03.03.0054	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	6.700.000
5.1.02.03.03.0062	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	55.000.000
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	0
5.1.02.03.03.0064	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	40.000.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.264.166.711
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.956.615.405
5.1.02.03.04.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	268.680.000
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	9.052.997
5.1.02.03.04.0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0
5.1.02.03.04.0089	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	299.055.241
5.1.02.03.04.0124	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	121.950.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	487.513.068
5.1.02.03.04.0127	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	121.300.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	186.035.000
5.1.02.03.05.0031	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya	186.035.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	44.320.357.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.820.357.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.626.037.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.107.080.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	87.240.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	500.000.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa/AiLuar Negeri	500.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	37.650.200.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.212.050.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.261.700.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	5.187.350.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	43.000.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	3.700.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.438.150.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	19.870.450.000

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	72.535.775.140
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	72.535.775.140
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	72.535.775.140
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	172.746.101.120
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	172.746.101.120
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	172.746.101.120
5.1.05	Belanja Hibah	70.018.565.449
5.1.05.01*	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	202.950.000
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	202.950.000
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	202.950.000
5.1.05.04	Belanja Hibah kepada BUMD	3.994.650.000
5.1.05.04.02	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	3.994.650.000
5.1.05.04.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada BUMD	3.994.650.000
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	63.858.652.049
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.624.095.700
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	17.872.707.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.751.388.700
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.811.112.500
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.159.950.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.651.162.500
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	36.318.443.849
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	34.639.943.849
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.678.500.000
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	105.000.000
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	105.000.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.962.313.400
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.962.313.400
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.962.313.400
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.027.302.300
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.477.302.300
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.477.302.300
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.477.302.300
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.550.000.000
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	3.550.000.000
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.550.000.000
5.2	BELANJA MODAL	230.168.315.856

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.100.000.000
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	8.100.000.000
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	8.100.000.000
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	8.100.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.200.495.964
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	500.150.000
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	486.950.000
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	486.950.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	13.200.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	13.200.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.517.220.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.451.220.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.545.570.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	90.000.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	387.650.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	428.000.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	66.000.000
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	66.000.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	175.030.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	175.030.000
5.2.02.03.03.0004	Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain	5.000.000
5.2.02.03.03.0005	Belanja Modal Alat Kalibrasi	15.200.000
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	8.200.000
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	20.500.000
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biaya	11.130.000
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	25.000.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	90.000.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	43.000.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	43.000.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	40.000.000
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	3.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.247.579.796
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.166.996.320
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	240.516.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.926.480.320
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.904.920.476
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	219.510.000
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	4.500.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	665.850.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	23.250.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.569.554.726

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	422.255.750
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	175.663.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	5.000.000
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	35.700.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	122.148.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	12.815.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.022.750.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	212.050.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	9.600.000
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	202.450.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	509.400.000
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	60.650.000
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	48.750.000
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	400.000.000
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	301.300.000
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	225.650.000
5.2.02.06.03.0048	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	75.650.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	16.178.964.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	15.972.964.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	15.972.964.000
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	206.000.000
5.2.02.07.02.0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	16.000.000
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	190.000.000
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.474.010.000
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.250.000.000
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	2.250.000.000
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	72.060.000
5.2.02.08.04.0002	Belanja Modal Modular Counting and Scientific Electronic	40.000.000
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	32.060.000
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	151.950.000
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	17.000.000
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	134.950.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	8.971.970.000
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	6.081.040.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	6.079.740.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.300.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.890.930.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	79.800.000
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	2.639.850.000
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	171.280.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	219.400.000
5.2.02.15.01	Belanja Modal Alat Deteksi	200.000.000
5.2.02.15.01.0003	Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya	200.000.000

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	5.400.000
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	5.400.000
5.2.02.15.04	Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan	14.000.000
5.2.02.15.04.0004	Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	14.000.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	236.500.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	236.500.000
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	1.500.000
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	235.000.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	50.000.000
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	50.000.000
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	50.000.000
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	60.000.000
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	60.000.000
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	60.000.000
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	18.400.460.968
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	18.400.460.968
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	18.400.460.968
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.103.461.200
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.103.461.200
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.103.461.200
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.458.208.688
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	36.098.208.688
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	36.098.208.688
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	32.600.202.761
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	100.556.608
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.591.480.000
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	129.923.500
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	18.150.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	530.510.000
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	379.560.819
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	747.825.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	360.000.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	360.000.000
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	360.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.114.807.812
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	75.820.187.273
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	63.393.107.743
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	46.858.771.114
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	16.359.987.289
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	174.349.340
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	12.427.079.530
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	11.002.267.965
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	1.424.811.565

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	14.944.103.539
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	7.181.212.858
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	6.683.862.858
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	85.000.000
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	150.000.000
5.2.04.02.01.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	262.350.000
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	4.825.384.600
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	4.825.384.600
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.840.606.081
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	1.840.606.081
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	378.000.000
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	378.000.000
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	718.900.000
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	532.600.000
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	186.300.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	9.213.100.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	16.100.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	16.100.000
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.541.750.000
5.2.04.03.02.0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	1.541.750.000
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	7.655.250.000
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	7.655.250.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	14.137.417.000
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	14.137.417.000
5.2.04.04.02.0001	Belanja Modal Jaringan Transmisi	1.000.000
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	14.136.417.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.294.803.392
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	10.500.000
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	6.500.000
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	6.500.000
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	4.000.000
5.2.05.01.03.0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	4.000.000
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	30.000.000
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	30.000.000
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	30.000.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	890.900.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	890.900.000
5.2.05.08.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	890.900.000
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.213.403.392
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.213.403.392
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.213.403.392
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	150.000.000

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	150.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.076.266.839
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	24.076.266.839
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	24.076.266.839
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	24.076.266.839
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	24.076.266.839
5.4	BELANJA TRANSFER	339.427.533.497
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	30.677.040.097
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	26.764.871.787
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	26.764.871.787
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	26.764.871.787
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.912.168.310
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.912.168.310
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.912.168.310
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	308.750.493.400
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	100.152.000
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	100.152.000
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	100.152.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	308.650.341.400
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	97.236.088.400
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	97.236.088.400
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	211.414.253.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	211.414.253.000
	Jumlah Belanja	2.406.376.986.992
	Total Surplus/(Defisit)	(122.421.630.826)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	158.921.630.826
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	147.921.630.826
6.1.01.01*	Pelampauan Penerimaan PAD	2.273.110.000
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	2.273.110.000
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.273.110.000
6.1.01.05	Penghematan Belanja	145.648.520.826
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	81.863.236.000
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	77.316.000.000
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	4.547.236.000
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	63.785.284.826
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	55.459.000.000
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	8.326.284.826

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	11.000.000.000
6.1.05.06.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	11.000.000.000
6.1.05.06.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat	11.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	158.921.630.826
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.500.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	25.500.000.000
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	25.500.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	25.500.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000
6.2.04.06	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	11.000.000.000
6.2.04.06.02	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	11.000.000.000
6.2.04.06.02.0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat	11.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.500.000.000
	Pembiayaan Netto	122.421.630.826
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Bupati Bantul



ABDUL HALIM MUSLIH